

1 D4 - TEKKOM B

RESENSI FILM BAB YANG HILANG SOEKARNO VS HATTA



Nama	:	Septian Bagus Jumanoro
Kelas	:	1 – D4 Teknik Komputer B
NRP	:	3221600039
Dosen	:	Mulyadi J. Amalik S.S., M.Si
Mata Kuliah	:	Pancasila dan Kewarganegaraan
Hari/Tgl. Praktikum	:	Rabu, 29 November 2021



PERBEDAAN PENDAPAT ANTARA BUNG KARNO DAN BUNG HATTA DALAM HAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN

SEPTIAN BAGUS JUMANTORO / 3221600039 / DTIK / TEKNIK KOMPUTER / 1-D4
TEKNIK KOMPUTER-B PKN

A. IDENTITAS FILM

Judul Film : Bab yang hilang Soekarno vs Hatta
Produser Film : Andhy Panca K
Sutradara Film : Dandhy D Laksono
Pemain Film : Halida Hatta, Anhar Gonggong, Asvi Warman Adam, Rachmawati
Soekarnoputri, Bonnie Triyana
Durasi Film : 24 menit
Penulis Naskah : Dandhy D Laksono
Produksi : Kompas TV

B. SINOPSIS FILM

Film ini merupakan film dokumenter yang menceritakan tentang suatu hal dari Bung Karno dan Bung Hatta yang jarang orang ketahui. Bung Karno di Batavia menggalang dana agar para mahasiswa yang ditahan di Belanda dibebaskan termasuk Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta dikenal sebagai tokoh proklamator yang bekerja sama agar dapat mengusir penjajah dari tanah air. Melalui artikelnya Bung Hatta membela Bung Karno dan PNI atas tidak terintimidasi dengan polisi belanda.

Pada 1 Desember 1956 Bung Hatta mengundurkan diri dengan alasan yang tidak jelas. Bung Karno juga menyebut kalau Bung Hatta pedanting, terlalu teoritis, dan berkiblat ke barat. Bung hatta juga dicekal untuk pergi keluar negeri atau menjadi dosen di UGM. Bagi Bung Hatta revolusi sudah selesai dan saatnya melakukan pembangunan. Desas - desus mundurnya Bung Hatta menjadi gamblang ketika tahun 1960 beliau menulis sebuah risalah berjudul Demokrasi Kita. Pada 1955 setelah pemilu dan DPR terbentuk ia akan mengundurkan diri.

Pada tahun 60an pemerintah mengirim mata-mata ke rumah bung hatta untuk mencari tahu siapa saja yang mengunjungi bung hatta dan kemudian para tokoh itu dipanggil ke istana untuk dilarang mengunjungi bung hatta. Bung Karno tidak menghendaki Liberalisme dalam alat demokrasi dan Bung Hatta sampai mengeluarkan keputusan yang mendorong terbentuknya partai politik dan dijanjikan pemilu untuk menjegal keputusan Sukarno. Meskipun bekerja sama untuk mengusir penjajah dari Indonesia Bung Karno dan Bung Hatta terkadang memiliki perbedaan pendapat tentang bagaimana mengatur urusan politik dan pemerintahan.

4 Juli 1927 bung Karno mendirikan di saat yang bersamaan bung hatta sedang bersekolah di belanda dan bergabung dengan Perhimpunan Indonesia. Bung Hatta pernah di penjara di belanda karena dituntut menghasut pemberontakan dan penjara 3 tahun pada tahun 1928. Tokoh politik dan setiap duta besar selalu datang di rumah bung hatta setelah bung hatta mengundurkan diri.

Pada 5 Juli 1959 Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden sebagai tanda dimulainya Demokrasi terpimpin. Setahun setelahnya majalah Panji menerbitkan tulisan Bung Hatta. Risalah Bung Hatta berisi:

1. Mengkritik Presiden Sukarno yang membentuk sendiri kabinet, padahal masih dalam sistem kabinet parlementer sesuai UUDS 1950.
2. Mengkritik Presiden Sukarno karena membubarkan badan Konstituante yang dipilih rakyat sebelum UUD baru selesai.
3. Presiden Sukarno dianggap melakukan Kudeta karena sebagai kepala pemerintahan membubarkan DPR & Menyusun DPR baru yang anggotanya ditunjuk sendiri.
4. Tentara mulai tidak profesional karena dilibatkan dalam urusan di luar pertahanan eksternal

Kemudian Bung Hatta memiliki beberapa kekecewaan saat menjadi wakil presiden:

1. Sistem pemerintahan menjadi ultra-demokratis karena sistem presidensial (UUD 1945) diganti sistem parlementer (UUDS 1950) seperti di Eropa barat
2. Dwitunggal Sukarno-Hatta hanya menjadi simbol negara belaka dan tidak efektif mengontrol jalannya pemerintahan yang dikendalikan perdana Menteri
3. Menteri – Menteri bertindak sendiri – sendiri demi kepentingan partai
4. Pegawai dan jabatan – jabatan publik dipenuhi orang partai, bukan kalangan profesional
5. Pembangunan tidak berjalan karena konflik politik antar golongan yang tak berkesudahan
6. Otonomi daerah dengan kewenangan mengurus keuangan sendiri, tak kunjung dilaksanakan dan menimbulkan pergolakan di daerah
7. Partai Komunis Indonesia (PKI) terlalu diuntungkan
8. Tidak setuju dengan Demokrasi terpimpin yang digagas Bung Karno

C. ANALISIS FILM

Etika Pancasila

Dalam film dokumenter tersebut, terdapat beberapa perbuatan yang mencerminkan nilai dari etika Pancasila seperti saat Bung Karno dan Bung Hatta saling kritik satu sama lain tetapi pada akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta menyatukan pemikiran agar dapat memerdekakan Indonesia dari penjajah. Namun ada juga beberapa perbuatan atau kebijakan Presiden Sukarno yang melenceng dari nilai Pancasila terutama sila keempat. Presiden Sukarno membuat kebijakan demokrasi terpimpin. Hal ini jelas menyalahi sila keempat dari Pancasila karena Presiden Sukarno mengambil keputusan secara sepihak.

Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Pada film dokumenter tersebut sangat menjunjung tinggi nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Karena Bung Karno dan Bung Hatta menjunjung tinggi persatuan agar dapat menyatukan bangsa dan memerdekakan Indonesia.

Hak dan Kewajiban (Hubungan Negara dan Warganegara)

Pada film dokumenter tersebut, Terdapat beberapa kebijakan menyimpang yang dilakukan pemerintah, contohnya seperti Presiden Sukarno yang membubarkan DPR dan

membuat DPR-GR yang anggotanya ditunjuk oleh Presiden Sukarno sendiri. Kemudian karena terlalu banyak konflik politik pembangunan tidak berjalan serta otonomi daerah yang tidak kunjung dilaksanakan

D. KESIMPULAN FILM

Film dokumenter ini sangat direkomendasikan karena menceritakan sisi lain dari persahabatan Bung Karno dan Bung Hatta. Film ini juga mengajarkan meskipun berbeda pendapat dan terkadang saling lempar kritik Bung Karno dan Bung Hatta tetap mendahulukan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadinya.